

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat tiap tahunnya, banyak dari kita mendapatkan manfaatnya meskipun tidak sedikit juga efek negatifnya. Pada saat ini dunia sudah memiliki teknologi yang canggih untuk memudahkan kehidupan sehari-hari di segala bidang, terutama teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi menjadikan hampir semua informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Hal ini membuat perusahaan mencari tahu segala informasi yang dibutuhkan perusahaan termasuk peraturan perpajakan di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan e-faktur pajak yang dimana setiap WP yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP, WP tersebut wajib menerapkan peraturan e-faktur ini yang sudah diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Diaturinya peraturan ini diharapkan dapat memaksimalkan pemasukan bagi Negara serta mengurangi penyimpangan faktur pajak yang berbentuk faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda yang sudah dilaporkan oleh WP lain.

Dengan adanya E-faktur ini menjadikan setiap PKP akan diberikan *id* sebagai pengenal dan *password* sehingga nantinya WP tinggal *log in* dan dikirim lewat *online*, ada sistem ini diharapkan akan menghemat pembiayaan WP dikarenakan tidak memakai kertas lagi sebagai bukti. Hal ini sudah sesuai

dengan peraturan Dirjen Pajak surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak (E-faktur). Salah satu pajak yang tertera di dalam e-faktur tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU No. 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Jadi prinsipnya pajak ini membebankan jumlah pajak terutang kepada konsumen akhir yang memakai produk dan jasa tersebut.

PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin merupakan perusahaan di bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Perusahaan ini memberikan jasa pelayanan bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dan/atau *truck* begitu juga sebaliknya. Dikarenakan jasa pelayanan bongkar muat termasuk penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean maka perusahaan ini diwajibkan untuk membuat SPT Masa PPN menggunakan e-Faktur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER/16/PJ/2014.

Berdasarkan pengumuman dari Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016 Nomor: PENG-05/PJ.09/2016 tentang penerapan e-Faktur secara nasional menjadikan seluruh PKP di Indonesia diwajibkan membuat SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur

mulai tanggal 1 Juli 2016. Hal ini membuat PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, siap atau tidak siap dalam waktu yang singkat harus membuat SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur di perusahaan tersebut mulai tanggal 1 Juli 2016. Padahal penggunaan aplikasi e-Faktur masih banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan penerapan dan hambatan dalam penggunaannya.

Dengan demikian, timbul ketertarikan dari peneliti untuk mengetahui secara khusus dan menganalisis keefektifan penerapan e-Faktur di PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin. Apalagi, pembahasan tentang e-Faktur menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas karena merupakan program aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP.

Beberapa Penelitian terdahulu tentang penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) diantaranya telah dilakukan oleh Elyong (2016) Oktaviarini (2016), Jovani (2016), dan Susanto (2016).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan-tahapan penerapan sistem e-faktur di PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin?
2. Bagaimana efektifitas penerapan e-faktur di PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin?

#### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam objek penerapan e-Faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN dibatasi pada Masa Juli – November 2016 sedangkan aspek

efektifitas dilihat dari aspek tugas atau fungsi dan aspek ketentuan dan peraturan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji tahapan-tahapan penerapan e-Faktur di PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin.
2. Menganalisis keefektifan penerapan e-faktur di PT. Karya Berkah Lestari Banjarmasin.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat memperoleh masukan dan melaksanakan tahapan-tahapan penerapan e-Faktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

###### **b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Penelitian ini diharapkan bagi Direktorat Jenderal pajak dapat dijadikan sebuah informasi untuk evaluasi Direktorat Jenderal Pajak tentang penerapan e-Faktur di Indonesia.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan perbandingan sekaligus salah satu sumber informasi dalam penyusunan penelitian selanjutnya.